

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem informasi adalah suatu kumpulan dari beberapa komponen yang terkait antara satu dengan yang lainnya serta terhubung dengan pengaliran informasi[1]. Oleh karena hal tersebut, peranan sistem informasi dapat membantu organisasi dalam penyebaran informasi dan mempermudah kegiatan operasional yang ada. Penggunaan sistem informasi yang baik dapat diciptakan melalui tata kelola sistem informasi yang baik yang kemudian akan memberikan suatu nilai tambah bagi organisasi.

Tata kelola teknologi informasi sendiri merupakan aspek penting yang akan memberikan jaminan efisiensi dan pencapaian kualitas layanan yang ada dalam organisasi[2]. Tata kelola teknologi informasi bertujuan untuk mempermudah kegiatan yang ada di dalam organisasi serta membantu organisasi dalam pengambilan keputusan. Salah satu kerangka kerja yang sering diterapkan untuk mendukung tata kelola teknologi informasi adalah COBIT 5. Penerapan kerangka kerja COBIT 5 akan memberikan hasil berupa pengetahuan mengenai tingkat kematangan teknologi informasi serta rekomendasi yang sekiranya diperlukan oleh organisasi untuk diterapkan dan dikembangkan di masa yang akan datang. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, ada baiknya penerapan kerangka kerja COBIT 5 dimulai dari organisasi daerah seperti pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar (DPMPTSP) sendiri merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan yang terkait dengan pengurusan

penanaman modal dan urusan perizinan daerah. Adapun tugas yang dilakukan oleh DPMPTSP adalah menyusun kebijakan dan pengembangan penanaman modal dan perizinan, promosi dan kerjasama investasi, pelayanan penanaman modal dan perizinan serta melakukan pengendalian terhadap penanaman modal dan perizinan daerah. Dalam pengurusan izin, DPMPTSP juga bertanggung jawab untuk menangani jenis izin seperti izin apotik, izin depot air minum, izin kerja analisis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik, izin kerja perekam medis, izin kerja tenaga gizi, izin kerja radiografer, izin klinik, izin mendirikan rumah sakit kelas C dan D, izin praktik bidan, izin operasional puskesmas dan jenis izin lainnya.

Demi mendukung kelancaran proses kegiatan yang ada di DPMPTSP, maka pihak DPMPTSP juga menyediakan sistem informasi berbasis *website* baik itu sebagai terobosan dalam hal kemudahan dalam pengurusan izin maupun sebagai sarana pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat jika di dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. *Website* tersebut berisi mengenai bagaimana langkah – langkah dalam melakukan pengurusan perizinan *online* serta syarat – syarat apa saja yang diperlukan ketika ingin melakukan pengurusan izin di DPMPTSP sehingga masyarakat tidak perlu merasa terbebani ketika ingin mengurus perizinan ke DPMPTSP. Selain itu pihak DPMPTSP juga menyediakan sistem informasi manajemen pelayanan terpadu (SIMPADU) yang dapat digunakan masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara *online*. Dalam penggunaannya, sistem informasi ini berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan perizinan tanpa harus mengurus berkas persyaratan secara langsung ke kantor. Masyarakat hanya perlu datang ketika surat izin yang diadukan telah selesai.

Akan tetapi dibalik kemudahan yang dirasakan masyarakat, pihak DPMPTSP masih memiliki kendala dalam penggunaan sistem informasi

tersebut. Sistem informasi yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinilai belum optimal dikarenakan data yang belum terintegrasi sehingga menimbulkan hambatan dalam penyampaian informasi terkait pengajuan layanan. Selain itu terbatasnya pegawai yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal dalam teknologi juga menjadi masalah dalam pengelolaan tata kelola sistem informasi dikarenakan pekerjaan yang menjadi tumpang tindih dalam melakukan perekapan data sehingga waktu yang digunakan dalam perekapan data menjadi lebih lama.

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini perlu dilakukannya penilaian tingkat kematangan sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikarenakan penggunaan sistem informasi yang masih belum dapat mencapai tujuan organisasi dalam menciptakan sistem informasi yang efektif dan efisien. Penilaian tersebut dianggap dapat memberikan pengetahuan terkait level kematangan sistem informasi yang dimiliki organisasi saat ini serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan yang sekiranya diperlukan organisasi di masa yang akan datang[3]. Adapun kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini ialah kerangka kerja COBIT 5. COBIT 5 (*Control Objectives for Information and Related Technology*) merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan penilaian tingkat kematangan yang berfokus pada bagaimana organisasi dalam melakukan tata kelola teknologi informasi. COBIT 5 sendiri terdiri atas panduan *best practises* yang menyajikan kegiatan dalam struktur organisasi IT yang telah disusun oleh para ahli di bidang tata kelola IT. Selaian itu COBIT 5 juga dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan dengan melakukan perhitungan tingkat kematangan yang sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini akan berfokus pada domain MEA yang membahas mengenai proses monitor dan evaluasi terhadap perencanaan yang dibuat serta bagaimana penyampaian layanan pada pengguna.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Penggunaan sistem informasi yang masih belum mencapai tujuan organisasi untuk menciptakan sistem informasi yang efektif dan efisien.
2. Belum adanya penerapan penilaian tingkat kematangan terkait dengan bagaimana organisasi dalam melakukan tata kelola teknologi informasi.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang timbul ialah :

1. Bagaimana cara untuk meningkatkan sistem informasi yang optimal sehingga mencapai tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar?
2. Apa yang harus dilakukan dalam penerapan penilaian yang tepat untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan sistem informasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Melakukan penilaian tingkat kematangan sistem informasi ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
2. Membuat rekomendasi yang sesuai berdasarkan dari hasil penilaian tingkat kematangan organisasi untuk diterapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

1.5. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Penilaian tingkat kematangan sistem informasi akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
2. Domain yang akan digunakan ialah domain Monitor, Evaluate dan Assess (MEA).
3. Penelitian ini melibatkan kepala dinas dan kepala bidang divisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar yang berhubungan dengan sistem informasi organisasi.

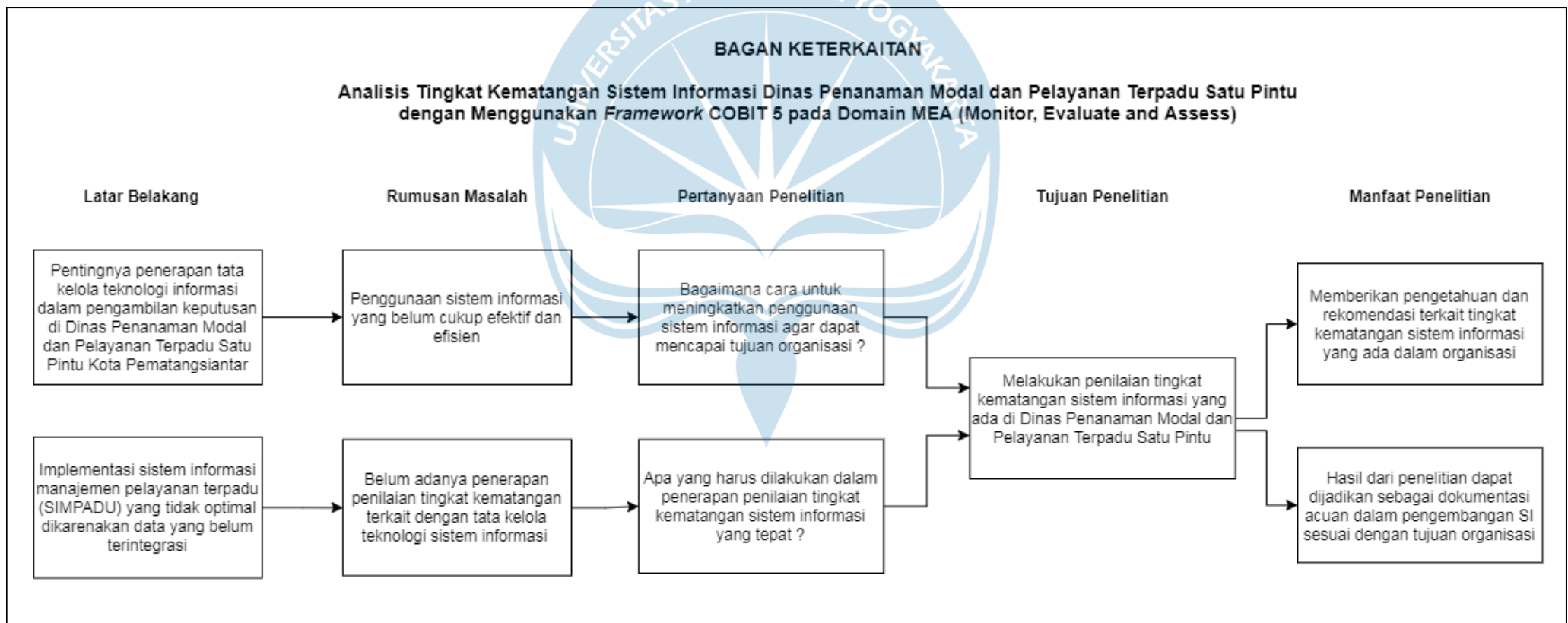
1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

Memberikan pengetahuan dan rekomendasi terkait tingkat kematangan sistem informasi yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan.

1.7. Bagan Keterkaitan

Berikut merupakan bagan keterkaitan antara latar belakang, masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Bagan Keterkaitan